

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana Penulis kemukakan pada bab sebelumnya, di dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang penulis temukan di Lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. Adapun bab ini meliputi deskripsi data, temuan penelitian, analisis penelitian.

A. Gambaran Umum

Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini. Peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informasi sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

1) Gambaran umum Kehidupan Muslim di selatan Thailand

Seperti telah kita ketahui bersama, Thailand adalah Negara yang serning dikenal Negeri gajah putih. Negeri ini juga terkenal sebagai tujuan wisata para turis dari seluruh dunia. Bidang pertanian juga merupakan salah satu andalan dari negeri ini. Hampir seluruh hasil pertanian dan perkebunan yang berasal dari Thailand merupakan produk unggulan.

Islam sebagian besar muslim di negeri ini tinggal di Thailand bagian selatan, yang banyak berada di provinsi Yala, Narathiwat, dan Pattani. Secara budaya dan penampakan fisik, mereka lebih dekat kepada

masyarakat Melayu. Jika kita melihat sejarah yang telah berlalu, wilayah-wilayah tersebut tadinya bukan merupakan bagian dari Thailand. Namun sejak tahun 1808, Thailand menjajah wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan. Tentu saja banyak pertentangan yang terjadi karena Thailand merupakan negeri budha yang menganggap raja sebagai keturunan dewa. Sehingga banyak ritual syirik yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Pemberontakan pun pernah terjadi, dan hingga saat ini pun masih ada pertentangan-pertentangan yang terjadi karena perbedaan prinsip tersebut.

Walaupun mayoritas ada dibagian selatan Thailand, namun bukan berarti di bagian lain Thailand tidak ada muslim. Katakanlah Bangkok, ibukota Thailand. Adapun lebih jelasnya pembagian kota bisa lihat digambar peta dibawah ini:



Gambar 4.1 Peta Negara Selatan Thailand

Islam di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan negeri gajah putih ini, antara lain Provinsi Pattani (80%), Yala(68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%) juga Songkhla, seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri. Meskipun Thailand terkenal sebagai negeri Buddha, akan tetapi sekarang kerajaan cukup mensupport kehidupan Islam untuk penduduknya. Tanggungjawab masalah berkaitan agama Islam di Thailand diemban oleh seseorang mufti yang memperoleh gelar Syaikhul Islam (Chularajmontree). Mufti ini ada di bawah kementerian dalam negeri serta juga kementerian pendidikan serta bertanggungjawab pada raja. Mufti bertugas buat mengatur kebijakan yg bersangkutan dengan kehidupan muslim, seperti penentuan awal serta akhir bulan hijriyah. Jumlah kaum muslimin di Thailand mencapai 4.6% dengan statistik terbaru sekitar 4 juta dari total 65 juta penduduk, namun Islam menjadi agama mayoritas kedua setelah Buddha.

B. Paparan data

Dengan perkembangan penduduk muslim diselatan thailand maka dibangun sebuah lembaga syar'i yaitu Majelis Agama Islam Wilayah Pattani untuk mengontrolkan Umat muslim di selatan Thiland yang menurut hokum-hukum islam dan menjauhi apa yang dilarang oleh islam. Dari majelis tersebut adalah Majelis Agama Islam Wilayah Pattani yang berkembangnya sehingga 3 Cabang di selatan Thailand.

1). Gambaran umum Majelis Agama Islam Wilawah Pattani

a) Sejarah Majlis Agama Islam Pattani.



Sebelum perang dunia Ke II, Umat Islam di Patani banyak perlisihan yang berlaku, Para Ulama Patani merasa tamggung jawab atas perlisihan tersebut. Maka membangun suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang ada khususnya masalah *Ahwal Syakhsiyah*. Maka membangun tempat penyelesaian hal ahwal agama yang bernama “*Majelis Agama Islam*”.

Majlis Agama Islam Patani dibina pada tahun 1940 M. Yang mana pada waktu itu para *alim ulama* Patani merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku di dalam wilayah Patani, oleh karena tidak ada sesuatu badan pun yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal ahwal Agama Islam seperti *wali amri* atau *Qadi*.

Dengan demikian para *alim ulama* di wilayah Patani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai *Qadi Syar'i*, mengurus dan mangawal orang-orang Islam di wilayah Patani.¹

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan melantik Al- Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulung bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang ulama' yang terkenal pada waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan selaku Qadhi Asy-Syar'I Adh-dharury Wilayah Patani.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan Qadhi Asy-Syar'I untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkaitan dengan hukum syara' dan juga sebagai penasehat kepada Raja Negeri (Gubernur) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.²

Pada tahun 1944 M. berlakunya peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerejaan Thailand yang mana pihak Pengadilan Thai/Siam mengutuskan bahwa tidak dikecualikan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian Selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil Thai, lalu semua ulama' dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulung mengadakan pertemuan membentuk kerja sama antara

¹ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani.

² Pengenalan ringkas Majelis Agama.

ulama dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rapat-rapat ulama' lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. pertumbuhan semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M. pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh Tengku Kamariah yaitu adik kepala Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul Qadir (Raja Patani yang Terakhir).

Sedangkan Haji Sulong mengatur 2 (Dua) Strategi yaitu sembunyi dan terang-terang. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pengerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu;

- a. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.

- b. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
- c. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
- d. Pegawai kerajaan harus orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
- e. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
- f. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khusus yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
- h. Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujui oleh ketua besar di empat wilayah.³

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi

³Ayah. Bang Nara, Patoni Dahulu dan Sekarang, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 56.

(Datok Yuttitam) dan mulai mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Majlis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan “Datok Yuttitam” penulis ingin memberi pengertian dengan kata “Datok Yuttitam” Pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur Stul mengundang imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negara itu sendiri karena Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari’ah Islam dalam ilmu fara’id.⁴

menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, muzakki adalah orang atau badan

⁴ Skripsi Hanan Thoma, Penyesaian Sengketa Poligami. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

⁵ Harahap, M. Yahya. 1999. “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Cetakan Kedua, hlm. 21-80. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

hukum yang dimiliki oleh Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahiq adalah orang atau badan hukum yang berhak menerima zakat.⁵

mengatakan bahwa “menguasa dan fungsi di dalam kasus Pengumpulan Zakat”. Oleh karena itu jika Maha Raha negara itu tidak dilantikan lagi, maka yang harus di selesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitam, menurut tata cara di atas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitam mengikut pandangan Syari’ah Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam diperintah pada tahun 2472 B. (Budha) untuk menterjemahkan dari bahasa “Melayu, Arab, Ingris, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Setelah diterjemahkan panitia penasihat peradilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan dasar hukum zakat” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan

pengelolaan dan zakat tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun. Sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru, pihak kerajaan Siam melantikan salah seorang yang beragama Budha menjadi pemerintah yaitu Coompul.Poe.Pi'Bulsongkram menjadi pemerintah, waktu itu kebetulan perang dunia yang kedua. Pemerintah yang baru selalu mengadakan sarahan/sistem baru, yaitu Negara Thai patut ada Hukum Diktator sahaja walau berbeda Agama, harus meubarkan Hukum Islam yang berlaku di empat wilayah tersebut, pada tahun 2486 B. (Budha)./1944 M. Setelah pemerintah Coompul.Poe.Pi'Bulsongkram mengistiharkan tidak berlaku lagi Hukum Islam tersebut di dalam Peradilan Agama Islam tingkat pertama diempat wilayah selatan, timbul masalah di wilayah tersebut khusus di wilayah Pattani rakyat mengadakan demonstrasi menentang pemerintahan pusat, rakyat tidak mau ikut di dalam memutuskan kasus berkenaan dengan keluarga dan warisan di Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan umum. Setelah terjadi perang sengit di wilayah Patani ada diantaranya kiai-kiai atau Ulama'-ulama' sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyarwarah diantaranya Imam-imam mesjid setiap desa untuk mencari solusi dan mempertahankan Hukum Islam yang telah di hapus oleh pemerintah pusat tersebut, dalam musyawarah untuk melantik pegawai-pegawai Majelis Agama Islam setiap wilayah di selatan dan seorang bijak pandai

yang dinamakan Datok Yuttitam atau Qadi Syar'i Daruri fungsinya untuk mengganti Datok Yuttitam sewaktu tidak ada ditempat.

Berkenaan dengan pegawai Majelis Agama Islam dan Datok Yuttitam setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam wilayah yang ada pegawai Majelis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenur.

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid "kepala 12" setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantikan pegawai mesjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.

Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Masjid, bangun Masjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

Oleh demikian di dalam pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan diantaranya dalam masalah pengelolaan zakat, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut hampir sama dengan hukum Islam di pengadilan Agama Islam di Indonesia.⁵

b. Visi dan misi.

a. Visi

วิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติภาพและความยุติธรรม

⁵ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam.

Terjemahan:

Majlis Agama Islam wilayah Patani, merupakan pusat pentadbiran badan hal ihwal agama dan akhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekautan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.⁶

b. Misi

- 1) เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัสยิดวินิจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540.
- 2) เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.
- 3) ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในแต่ละต่างประเทศที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลาม เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์.
- 4) ทุนบำรุงรักษาถ่ายถอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่สั่งสมจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืน สดภาพ

. Terjemahan:

- 1) Menjadikan pusat pentadbiran mengurus hal ihwal masjid, memberikan fatwa dan nasihat terhadap kegiatan badan kerajaan serta orang ramai mengikut hukum Islam.

⁶ Translidi bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

- 2) Menjadi badan yang berkonun, dalam usaha mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memilik kekuatan menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran.
- 3) Penyelaras dalam perhubungan dengan badan-badan organisasi kerajaan dan non kerajaan di dalam serta luar Negara, mewujudkan kerjasama maupun membawa kepentingan bersama untuk umat Islam.
- 4) Memelihara dan melestarikan hasil budaya tempat yang tidak bertentangan dengan Islam.⁷

c. Fungsi Dan Peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP)

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand adalah satu badan yang merangkumi oleh pihak-pihak yang tertentu yaitu ketua majelis sebab adalah badan yang tertinggi dalam Majelis Agama Islam Selatan Patani (MAIP) serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurus Majelis Agama Islam Selatan Patani serta ada wakil ketua dan sekretaris. Dan badan inilah salah satu mengambil kerjakan dalam mengatur badan-badan yang tersebut adalah:

- a. Badan Keuangan
- b. Badan Ekonomi

⁷Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pengawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

- c. Badan Pelajaran
- d. Badan Dakwah
- e. Badan Zakat

Demikian juga pada badan dan peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP) yang menguasai dalam pemerintah juga terbagi kepada dua kesimpulannya yaitu: Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya:

- a. Menyelesaikan masalah keluarga suami- isteri, pernikahan dan perceraian.
- b. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talaq, fasakh talaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.
- c. Meyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hibah dan warisat.
- d. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.
- e. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
- f. Menentukan dan mengistiharkan puasa dan berhari raya, dll

Badan Pentadbiran Majelis : Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam khatib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan (kelompok) jawatan kuasa (Petugas) Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan

menentukan, berarti setiap Masjid yang mengadakan pertukaran Imam, khatib, bilal dan jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid hendaklah dengan melalui jamaah (kelompok) jawatan kuasa (petugas) Islam bagian provinsi, Imam, khatib, bilal berada dalam jawatan (Petugas) seumur hidup, ada pun jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan Masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 Masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang.

Selain daripada tugas-tugas yang tersebut di atas, pihak Majelis juga ikut serta dalam hal kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerjasama resistance.⁸

d. Fungsi dan Tugas

a. Waliyulamri Qadhi Syar'i.

Sebuah badan yang berdikari, dipilih/dilantik oleh Halluwal'aqdi, sebagai penasehat mufti hukum agama Islam kepada masyarakat Wilayah Patani.

b. Badan Syar'I dan Fatwa.

Berfungsi sebagai sebuah badan menyelidiki dan mengkaji hukum fatwa; mengeluarkan bahan bacaan ilmiah; menyelesaikan masalah rumah tangga, nikah, cerai, ta'liq, thalaq, fasakh; urusan zakat, wakaf, nadzar, wasiat dan hibah; mengurus anak yatim.

c. Badan Pentadbiran dan Pengurusan Masjid.

⁸ Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam.

Mentadbir dan melantik kepengurusan sebagai pemegang amanah kepengurusan Masjid, Tadika, dan segala hal ihwal yang bersangkutan dengan Masjid.

d. Badan Pendidikan dan Pengajaran.

Badan Pendidikan dan Pengajaran, sebuah badan mengatur urusan hal manahij pengajian Masjid dan Tadika; pengajian dan pembelajaran sekolah dan pondok; urusan ta'lim, kursus kanak-kanak, remaja dewasa kaum ibu; urusan pengajian dan pelajar dalam dan luar negeri; mengurus pengelolaan Ma'had Daru Ma'arif dan Sekilah kanak-kanak Fathani Darussalam mengawal serta melindungi Pustaka Wilayah.

e. Badan Perhubungan dan Kemasyarakatan.

Sebagai badan kemasyarakatan yang mengurus hal ilwal da'wah, penyiaran dan penyebaran; perhubungan dalam negeri maupun luar negeri; menguru; perhidmatan awam.

f. Badan Keuwanagan dan Ekonomi.

Sebagai badan yang mengatur ekonomi dan keuangan urusan haji maupun umrah; dan urusan barang halal.

e. Logo.



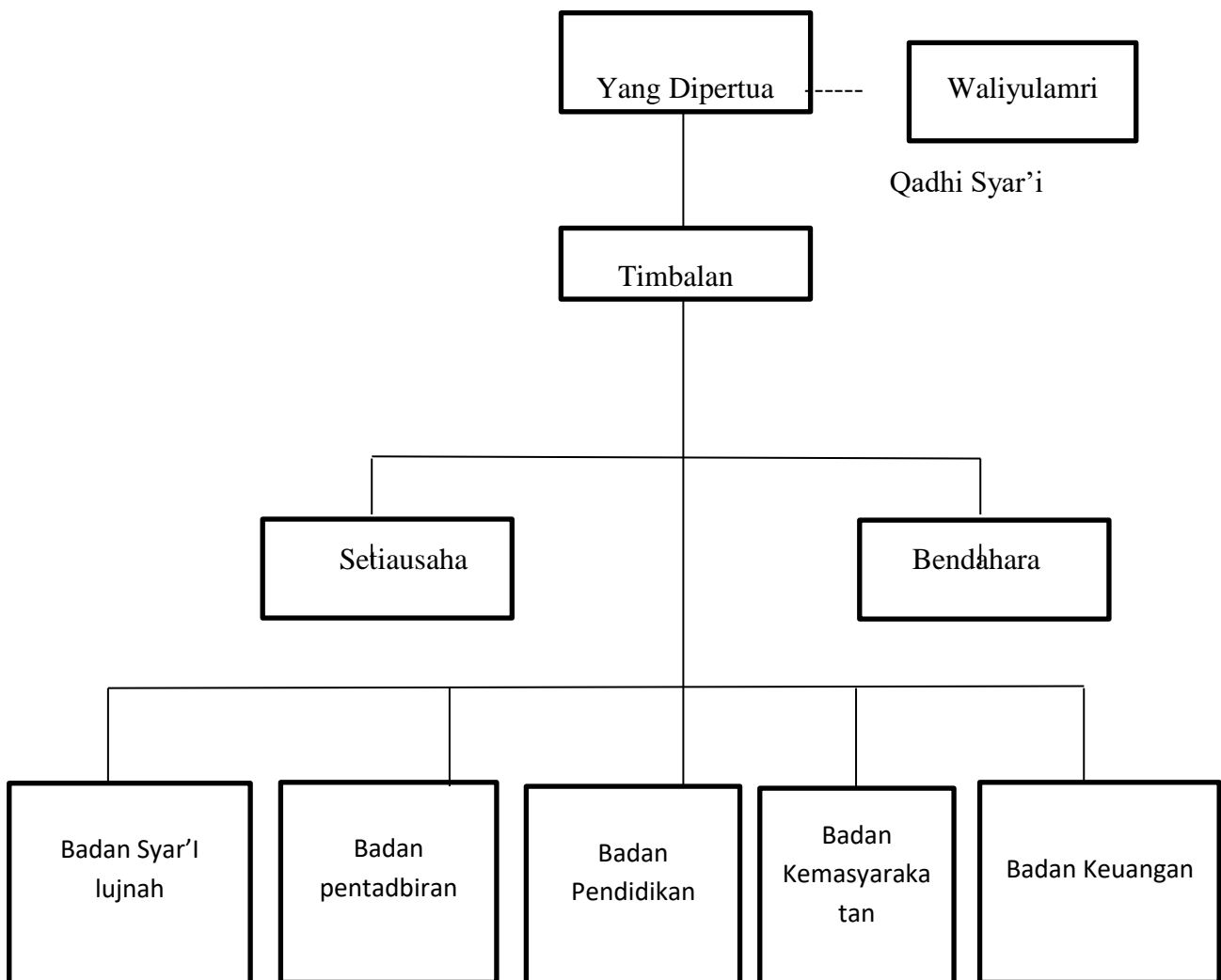
Gambar 4.2 Logo Majlis Agama Islam Pattani

f. Motto “Mendampingi Masyarakat dengan Aturan Islam.”

Maksudnya adalah untuk mendirikan, mengembang dan memajukan anggota dan komunitas untuk mengikuti sistem Islam yang berdasarkan Islam yang berkah dan mendapat keridhoaan Allah

g. Struktur Dan Pengurus.

Majlis Agama Islam Wilayah Patani.



‘Ulama Pengurusan Pengajian dan Ekonomi

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Majlis Agama Islam Pattani

1. Dasar Hukum di Majlis Agama Islam Patani.

- a. ต้องยึดมั่นกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ.
- b. ให้คำวินิจฉัยชี้แจงไปตามแนวทางของอิหม่านชาฟีอี.
- c. ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม.
- d. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนาโดยเฉพาะ อิหม่าน คอเต็บ และบิหลัน.
- e. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาอื่นประจำมัสยิดและเข้าวชน

Terjemahan:

- a. Masti berpengang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas.
- b. Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
- c. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.
- d. . Memggangkat taraf umat Islam terutama Imam, Khatib, Bilal.
- e. Menggangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan diwasa).⁹

C. Hasil penelitian

Berdasarkan hal penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian:

1. Bagaimana Cara Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

Kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Hj shihabuddin bin Walong selaku Ahli Jawatan kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani pada tanggal 10 April 2018, di ruang kantor manajer lantai 2.

⁹ Wawancara dengan Majelis Agama Islam, Haji Shihabuddin bin walong, 10 April 2018.

“jadi untuk proses penerapan sistem manajemen dalam sebuah organisasi manapun hampir sama, justru tidak akan terlepas dari 4 fungsi manajemen yaitu, *planning, organisasi, actuating* dan *controlling*. Akan tetapi fungsi tersebut bisa berbeda tergantung dengan kebijakan manejer dalam pengelolaannya. Begiu juga yang di terapkan dalam majelis agama islam kita. Bahwa langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat rencana. Untuk perencanaan secara umum dalam majelis kita disini yaitu, untuk berkembang dalam kemampuan ekonomi setiap anggota untuk kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup mereka dalam masyarakat serta menjadikan sebagai lembaga keuangan perekonomian yang bersumber dari uang yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem perencanaan yang di pengelolaan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planing*)

Planning yang dipengelolaan di Majelis jelis Agama Islam Wilayah Pattani setelah adanya evaluasi dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan setiap setahun sekali di akhir periode yang nantinya berguna untuk mengetahui kekurangan dari hasil usaha sebelumnya. Kekurangan dari hasil evaluasi nantinya akan disusun menjadi perencana program dalam mencapai tujuan di tahun yang akan datang. Perencanaan ini tentunya di tinjau ulang dan dan ditalaah lebih lanjut agar program yang akan dilaksanakan layak untuk di Pengelolaan sehingga apapun program yang nantinya akan dijalani berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya sesuai dengan ketetapan syariah.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Yang bersangkutan dengan fungsi manajemen dalam hal perencanaan adalah:

1). Perencanaan

- a). Dalam menganalisis perkiraan pada masa depan majelis agama islam wilayah pattani selalu mengfokuskan pada tujuan, yaitu meningkatkan target yang dicapai dengan mengembangkan professional manajemen. Selain itu, majelis juga mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi setiap anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya dengan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b). Dalam perencanaan , majelis juga melakukan langkah-langkah sosialisasi dengan menggunakan media seperti spanduk, radio,iklanan dan sebagainya. Kemudian adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga social lainnya untuk memperluas dan mengebangkan jaringan ekonomi yang berkualitas.

2). Perumusan Tujuan

Dalam perumusan tujuan majelis agama islam wilayah pattani, manajer majelis melakukan optimalisasi terhadap tujuan majelis yaitu menjadikan majelis sebagai lembaga perekonomian yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang professional dengan melantikan tenaga kerja yang berkualitas dalam mengembang para anggotanya.

3). Rencana Kegiatan

Analisis mengenai rencana kegiatan yaitu dengan merumuskan tindakan yang akan berlaku sesuai dengan target apa yang telah ditetapkan. Adapun perencanaan kegiatan manajemen majelis agama islam wilayah pattani adalah sebagai berikut:

- a). Menjadi majelis sebagai lembaga perekonomian yang berdasarkan pada prinsip Syariah Islam yang profesional,berkualitas dan adil.
- b). Menetapkan bagi ketua dari para anggotanya yang aktif dalam mengumpulkan dana dalam kelompoknya untuk menyelesaikan.
- c). Pemberian bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan seperti korban musibah banjir, bantuan untuk dana pendidikan, fakir miskin dan lain-lain.

b. Pengorganisasi (*Organisasi*)

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj shihabuddin bin walong selaku manajer pada majelis agama islam wilayah pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Aril 2018 diruang kantor manajemen lantai 2.

“Untuk langkah selanjuknya dalam majelis kita setelah kita buat rencana yaitu, kita ada pembagian kerja dalam setiap tugas kepada pihak yang bersangkutan. Terus kita melantikan Orang-orang tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Setelah itu kita menjelaskan fungsi kerja yang akan dilaksanakan kepada mereka agar semua pekerjaan yang dilakukan terarah pada satu tujuan. Kemudian apabila sudah memberi penjelasan tentang tugas masing-masing. Maka kepada setiap petugas juga harus memahami tugas apa saja yang telah diamanatkan dan bertanggung jawab atas tugas itu masing-masing. Begitu juga dengan tugas yang akan dilaksanakan itu harus mengikuti garis-garis dan wewenang yang telah ada dalam atruktur organisasi kita”.

Berdasarkan dari hasil wawancarayang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah menghimpun dan mengatur sumber daya dan tenaga yang tersedia ke dalam suatu karangka struktur organisasi mengikut kemampuan masing-masing.

Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat pembagian pekerjaan karena dengan jumlah yang banyak tidak mungkin dapat dikerjakan oleh oleh satu orang.
- 2) Menentukan orang-orang untuk mengerjakan setiap bahagian pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan mengikut landasan yang digariskan.
- 3) Merincikan seluruh pembagian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.

- 4) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
- 5) Setiap anggota struktur organisasi perlu mengetahui pesan masing-masing yang diberikan.
- 6) Menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam satuan organisasi.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj shihabuddin bin walong selaku manajer pada majelis agama islam wilayah pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 10 April 2018 di ruang kantor manajemen lantai 2.

“Selanjutnya setelah kita membuat rencana dan pembagian tugas kerja serta melantikan staf-staf kerjanya masing-masing. Maka untuk langkah berikut itu bagi setiap petugas yang sudah dapat kerja kita akan mengarahkan atau menggerakkan untuk melaksanakan kerjanya. Kemudian pada setiap bulan kita akan mengadakan rapat untuk menjelaskan program-program kerja kepada pengurus atau pihak yang bersangkutan. Dan kita juga beritahu kepada mereka bahwa sangat pentingnya kerjasama dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kemudian untuk staf-staf kerja kita juga akan memberi semangat kepada mereka secara menanamkan jiwa keislaman supaya ada sifat ikhlas, dan jadi orang yang adil dalam melakukan setiap pekerjaan. Jamuan makan bersama. Bagi karyawan yang melakukan tugas kerjanya bagus akan kita berikan penghargaan serta pujian kepada mereka dan akan kita tegur serta bimbing bagi mereka yang merasa ada kesulitan dalam pekerjaan”.

Berdasarkan dari hasil wawancarayang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan orientasi kepada karyawan dan anggota baru dengan memberikan penjelasan tentang tugas apa yang akan dilakukan dan memberikan berbagai informasi yang perlu diketahui agar kegiatan dapat dilakukan dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.
- 2) Memberikan penjelasan kepada setiap bawawanyan mengenai tugas masing-masing dan tujuan apa yang akan tercapai.
- 3) Menekan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan.
- 4) Memberikan motivasi kepada bawahannya dengan menanamkan adanya jiwa keislaman, keikhasan dan keadilan.
- 5) Memberikan motivasi kepada anggota denagan memberikan hadiah dalam bentuk undian pada setiap akhir tahun dan mengadakan jamuan makan bersama.
- 6) Memberi perhatian pujian kepada setiap bawahan yang cakap dalam melaksanakan tugas dan tegurang serta serta bimbingan kepada mereka yang kurang mampu bekerja.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj. shihabuddin bin walong selaku manajer pada majelis agama islam wilayah pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Aril 2018 diruang kantor manajemen lantai 2.

“Setelah kita memberi tanggung jawab kepada mereka itu kita akan memberi perhatian atas tugas mereka supaya tidak ada kesalahan dalam garis-garis serta dapat mencapai tujuan yang telah kita rencana. Kemudian pada setiap akhir periode kita akan mengadakan rapat agung untuk periksa atas tugas kerja yang telah dilakukan dan membagi keuntungan. Setelah itu, kita akan membuat penilaian terhadap tugas apa saja yang telah kita lakukan. Seterusnya setelah kita dapat hasil kerjanya, maka apabila ada masalah atau kekurangan dimana akan kita mencari solusi bersama sehingga menyelesaikan masalah yang terjadi serta memperbaiki kekurangan tersebut, maka setelah itu bagi setiap seksi yang bertanggung jawab harus membuat laporan dan serahkan kepada manajer untuk menjadikan arsip dan membagi kepada para anggota”.

Berdasarkan dari hasil wawancarayang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah memberi pertanggung jawaban kepada anggota atau pihak-pihak yang bersangkutan setiap seksi, maka pihak manajer akan mengawasi program kerja yang dilaksanakan oleh anggotanya agar tidak ada penyipanan dalam kerja demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

- 2) Pada akhir periode akan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk evaluasi pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan serta adanya pembagian zakat.
- 3) Mengadakan evaluasi terhadap hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sudah dilaksanakan oleh anggota dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 4) Setelah dievaluasi hasilnya jika ada permasalahan dalam program kerja yang telah dilaksanakan akan mengadakan rapat untuk mencari solusi bersama serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi. Adapun tindakan dalam pelaksanaan kerja, selanjutnya kepada pihak petugas setiap seksi akan membuat laporan program kerja yang telah dilaksanakan sebagai laporan tahunan dan menyerahkan kepada manajer untuk diperiksa kembali dan menjadikan arsip. Adapun hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) akan dilaporkan dalam bentuk buku laporan dan dibagikan kepada setiap para anggotanya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambatnya Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Selatan Thailand)

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj shihabuddin bin walong selaku manajer pada majelis agama islam wilayah pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Aril 2018 diruang kantor manajemen lantai 2.

“Untuk factor pendukung dalam perkembangan majelis kita, kita memperhitungkan dengan melakukan analisis terhadap beberapa faktor, seperti manajermen personalia lebih kita perhatikan dengan melakukan pelatihan dan pengarahan yang

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan tugas pada jabatan-jabatan tertentu. Dan selanjutnya kita melihat dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Aspek lingkungan seperti respon masyarakat terhadap majelis. Hal yang menjadi halangan bagi kami dalam manajer Majelis Islam disini, yaitu bagi masyarakat kita dihari ini masih ada yang kurang memahami bagaimana sistem Majelis itu sendiri khususnya dalam bidang zakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

a. Aspek lingkungan

Yaitu dukungan dari lingkungan masyarakat itu sendiri yang memberi respon cukup baik. Di lihat dari segi anggota di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani terus bertambah dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memberi dukungan penuh dan percaya terhadap Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

b. Aspek ekonomi

Kawasan Selatan adalah suatu kawasan yang subur dan kaya dengan bahan-bahan mentah. Wilayah ini menjadi penyumbang utama bagi pendapatan Negara. Di wilayah Selatan Thai terdapat hutan yang sangat kaya dengan berbagai macam jenis kayu. Di wilayah itu pula terdapat berbagai bahan pertambangan terutama logam dan timah. Selain dari itu,

Wilayah Selatan ini juga menduduki posisi penting dalam memproduksi hasil pertanian, seperti tanaman padi dan getah. Sedangkan wilayah perairannya, yakni di laut Cina Selatan dan laut Andaman, merupakan wilayah terpenting yang menjadi sumber perikanan.

c. Aspek Sosial dan Budaya

Di antara yang menjadi faktor pendukung aspek sosial dan budaya yaitu kuatnya budaya setempat yang mempengaruhi aktivitas kerja dalam Majelis, seperti pakaian melayu, Budaya menggunakan tersebut masih melekat kuat pada setiap aktivitas Majelis. Budaya menggunakan Bahasa Melayu bagi setiap karyawan dalam melakukan komunikasi, Hal ini telah memudahkan pengurus dan karyawan serta para anggota dalam melakukan koordinasi antara atasan dan bawahan.

d. Aspek Masyarakat

Sistem manajemen Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, masih memiliki beberapa kendala di masyarakat seperti, pengetahuan atau pemahaman sebagai masih kurang tentang ilmu agama Islam khususnya dalam bidang zakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menerima pendidikan agama Islam sejak awal di sekolah sadar cenderung sedikit sehingga manajemen Majelis Agama Islam Wilayah Pattani terdapat kesulitan dalam menjelaskan produk-produk yang keseluruhan menggunakan istilah Islam. Berdasar dengan hal tersebut faktor mental juga mempengaruhi dalam menerapkan manajemen Majelis yaitu, lemah

atau kurangnya mental masyarakat Muslim Pattani, dikarenakan cukup lama terpengaruh oleh fikir sebagai masyarakat Muslim Pattani.

e. Aspek Pemerintah

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj. shihabuddin bin walong selaku manajer pada majelis agama islam wilayah pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 10 April 2018 di ruang kantor manajemen lantai 2.

“Yang menjadi masalah bagi majelis kita yaitu tentang menjalankan kegiatan majelis Islam. Sebenarnya majelis kita mengadakan untuk menjagakan/mengotrolkan umat Islam di pattani. Karena itulah membangunkan sebuah badan syar I dengan berbagai-bagai badan dan undang-undang majelis.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada para nara sumber, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Konflik antara Pemerintahan Thailand dengan warga minoritas Muslim di wilayah Selatan Thailand sebenarnya telah berlarung cukup lama dan mengakar kepada berbagai macam aspek. Sejak Negeri Patani secara definitive dimasukkan ke dalam kerajaan Thai oleh Raja Chulalongkorn atau Rama V pada tahun 1902, masyarakat Muslim Negara tersebut mulai merasa gerah dan memiliki keinginan untuk keluar dari kekuasaan Kerajaan Thai atau bergabung dengan Malaysia yang ketika itu masih berada di bawah pemerintah Inggris. Gara-gara itulah Majelis Agama Islam Wilayah Pattani terdapat beberapa kendala.